

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2004:2).

Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan kepada para pembaca laporan keuangan, sedangkan bagi pemilik perusahaan sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu bagian terpenting yang menjadi perhatian para pembaca laporan keuangan adalah hasil kinerja operasional yang tercermin dari laba yang dilaporkan. Perhatian yang besar terhadap pelaporan laba sering kali membuat akuntan tidak memperhatikan prosedur dalam penyusunan laporan keuangan (Mahmud, 2007)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) sebagai salah satu agenda pengentasan kemiskinan yang digulirkan oleh Pemerintah Indonesia memiliki ragam jenis yang didasarkan pada aspek kewilayahan terdiri dari PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Perdesaan (Kementerian Pekerjaan Umum, 2010).

Berdasarkan Kementerian Pekerjaan Umum (2010) kegiatan operasionalnya kedua program tersebut melakukan pengelolaan keuangan melalui kegiatan pinjaman dana bergulir beserta seluruh aspek yang menyertainya termasuk sumber-sumber pendapatan serta pemanfaatannya. Unit Pengelola Keuangan (UPK) merupakan salah satu bagian program yang memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan dan pembukuan serta membuat pertanggungjawaban terkait dengan pemanfaatan biaya program.

Berdasarkan kementerian Pekerjaan Umum (2010) Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang akan mengelola dana pinjaman bergulir telah memenuhi kriteria minimal sebagai berikut:

1. Telah diangkat oleh BKM sebanyak minimal 2 orang (ideal 4 orang).
2. Telah memiliki uraian tugas dan tanggung jawab.
3. Telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan .
4. Telah memahami aturan dasar pinjaman bergulir.
5. Telah memiliki rekening atas nama UPK dengan kewenangan penandatanganan 3 orang.
6. Telah memiliki sistem pembukuan yang berlaku di PNPM Mandiri Perkotaan.
7. Kinerja pinjaman bergulir yang dijalankan mencapai kriteria memuaskan : peminjam berisiko (LAR)<10%, pinjaman berisiko (PAR)<10%, ratio pendapatan biaya (CCr)>125%, hasil investasi (ROI)>10%.
8. Kinerja pembukuan UPK minimal memadai

Seluruh aktifitas diatas akan terus ditinjau oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan serta pihak manajemen program melalui team pendamping yang dalam hal ini adalah fasilitator ekonomi. Selain peninjauan sebagai salah satu bentuk pengawasan dan evaluasi yang dijalankan melalui garis struktural (*top down*), secara berkala UPK yang bersangkutan harus

melaporkan pertanggungjawaban keuangannya kepada BKM dan manajemen program setiap bulan yang dilakukan paling lambat adalah tanggal 5 (lima) setiap bulannya (Kementerian Pekerjaan Umum, 2012)

Meskipun sama-sama melakukan pengelolaan pinjaman bergulir, UPK pada PNPM Mandiri perkotaan dan UPK pada PNPM Mandiri perdesaan memiliki banyak perbedaan dan kesamaan berdasarkan kapasitas keuangan yang dikelolanya. PNPM Mandiri perkotaan memiliki kapasitas yang lebih besar. Secara personal terdapat perbedaan latar belakang atau karakteristik UPK serta sebagian besar ditunjuk langsung oleh BKM tanpa memperhatikan latar belakang pendidikan maupun karakteristik yang lain. Hal tersebut karena pekerjaan UPK hanya atas dasar kerelawanan yang tidak digaji tetapi hanya mendapatkan jasa kehormatan (Kementerian Pekerjaan Umum, 2010)

Penilaian kinerja yaitu terkait dengan kesehatan keuangan UPK yang harus terpenuhi dan manfaat financial yang minim bagi pribadi UPK dalam hal ini tercermin dalam nominal jasa kehormatan dapat mempengaruhi etika penyusunan pelaporan keuangan yang dibuat. Hal tersebut seperti yang disampaikan Wyatt (2004) dalam Yulianti (2005) bahwa kelemahan yang terdapat pada akuntan adalah keserakahan individu dan korporasi, pemberian jasa yang mengurangi independensi, sikap terlalu 'lunak' pada klien dan peran serta dalam menghindari aturan akuntansi yang ada.

Pelanggaran etika tidak akan terjadi apabila setiap akuntan memiliki pengetahuan, pemahaman, dan menerapkan etika secara memadai dalam

pekerjaan profesionalnya. Pekerjaan seorang profesional harus dikerjakan secara profesional pula, dengan sepenuhnya melandaskan pada moral dan etika tertentu, dengan sikap profesionalnya, akuntan akan mampu menghadapi berbagai tekanan yang dapat muncul dari dirinya sendiri ataupun pihak eksternal. Kemampuan seorang profesional untuk dapat mengerti dan peka terhadap persoalan etika juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana dia berada (Mahmud, 2007)

Berdasarkan berbagai persoalan dan perbedaan penelitian sebagaimana yang telah diuraikan, maka peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perbedaan Persepsi Petugas Unit Pengelola Keuangan (UPK) PNPM Mandiri Perkotaan dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan Program”**.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah terdapat perbedaan persepsi petugas Unit Pengelola Keuangan (UPK) PNPM Mandiri Perkotaan dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan Program?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi petugas Unit Pengelola Keuangan (UPK) PNPM Mandiri Perkotaan dan Unit

Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan Program.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini:

A. Universitas

Penelitian ini dapat menambah pustaka dan dapat menambah pengetahuan mengenai pelaporan keuangan beserta berbagai aspek yang menyertainya termasuk mengenai etika penyampaian pelaporan keuangannya.

B. Bagi PNPM

Penelitian ini dapat di gunakan sebagai salah satu bahan evaluasi serta pengambilan kebijakan terkait pelaporan keuangan program sehingga dapat memberikan manfaat untuk perbaikan secara berkala.

C. Bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang etika penyampaian pelaporan keuangan khususnya dalam program PNPM Mandiri dan dalam penyampaian laporan keuangan secara umum.

D. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi maupun kajian bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan pembahasan pada bidang ini dan juga sebagai sarana untuk menambah wawasan.